

**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik
Tingkat Universitas di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2017–2024:
Pendekatan Regresi Data Panel**

Adela Yunensy¹, Nurjannah Rahayu Kistanti²

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Negeri Semarang

adelayunensy@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

Educated unemployment is a challenge for economic development, especially in Java, the center of higher education and national economic activity. This study aims to analyze the influence of the Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product (GRDP), Labor Force Participation Rate (LFPR), and Regional Minimum Wage (RMW) on the unemployment rate of university graduates in six provinces in Java for the period 2017–2024. This study uses panel data regression with the Random Effect Model (REM) approach. The results show that the HDI and GRDP have a positive and significant influence on educated unemployment in Java. The LFPR variable has a negative and significant influence on educated unemployment in Java. Meanwhile, the RMW variable has no effect on educated unemployment in Java. Suggestions from this study are that the government must ensure that the increase in HDI is balanced with equivalent employment opportunities, synergy between the world of education and the business world needs to be strengthened, there is a policy of active involvement of new graduates in productive activities, and increase productivity and the provision of work space.

Keywords: *Educated unemployment, HDI, LFPR, GRDP, RMW, panel data, Java Island*

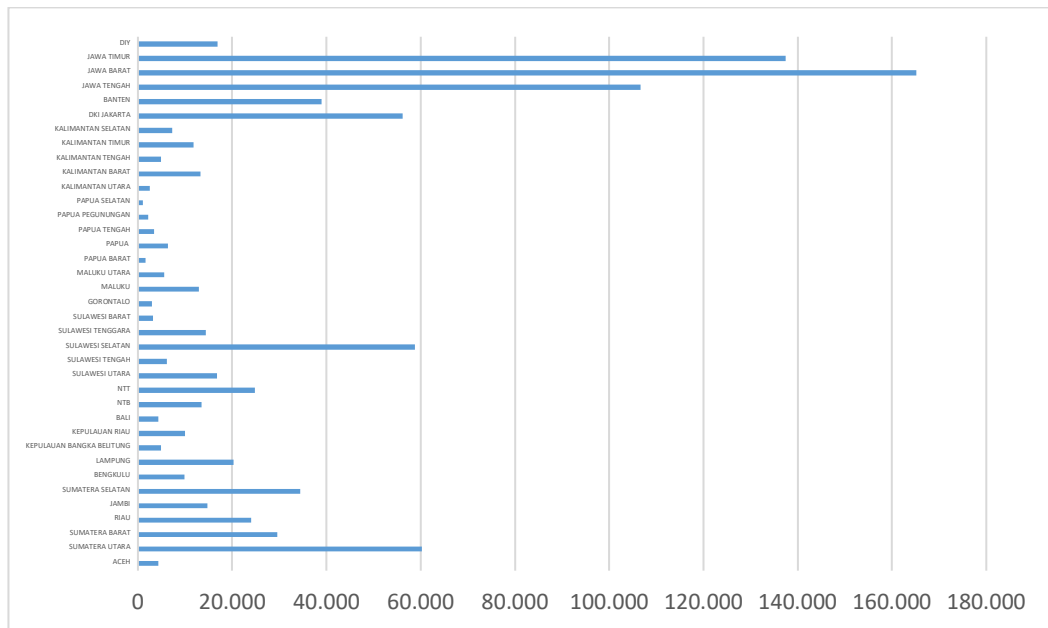
ABSTRAK

Pengangguran terdidik menjadi tantangan pembangunan ekonomi, khususnya di Pulau Jawa yang merupakan pusat pendidikan tinggi dan aktivitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat pengangguran terdidik lulusan universitas di enam provinsi di Pulau Jawa periode 2017–2024. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Pulau Jawa. Variabel TPAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Pulau Jawa. Sementara variabel UMR tidak berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Pulau Jawa. Saran dari penelitian ini pemerintah harus memastikan bahwa meningkatnya IPM diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang sepadan, sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha perlu diperkuat, adanya kebijakan pelibatan aktif lulusan baru dalam aktivitas produktif, dan peningkatan produktivitas dan penyediaan ruang kerja.

Kata kunci: Pengangguran terdidik, IPM, TPAK, PDRB, UMR, data panel, Pulau Jawa

PENDAHULUAN

Pengangguran terdidik merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, terutama di wilayah dengan tingkat urbanisasi dan konsentrasi pendidikan tinggi yang tinggi (Rozaini et al., 2023). Menurut Mankiw (2003), definisi pengangguran terdidik adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja, namun memiliki pendidikan setinggi SMA atau lebih. Secara teori, pendidikan tinggi dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas sosial, kenyataannya tidak semua lulusan perguruan tinggi dapat terserap dengan baik di pasar tenaga kerja (Hanushek & Zhang, 2020). Pendidikan tinggi diharapkan menjadi pintu gerbang mobilitas sosial dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, namun justru menjadi kelompok yang rentan terhadap pengangguran, terutama di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif (Muna et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak inklusif dan dinamika perubahan struktural dalam dunia kerja menyebabkan ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan dan permintaan tenaga kerja (Bank, 2022). Berikut data pengangguran terdidik di Indonesia.



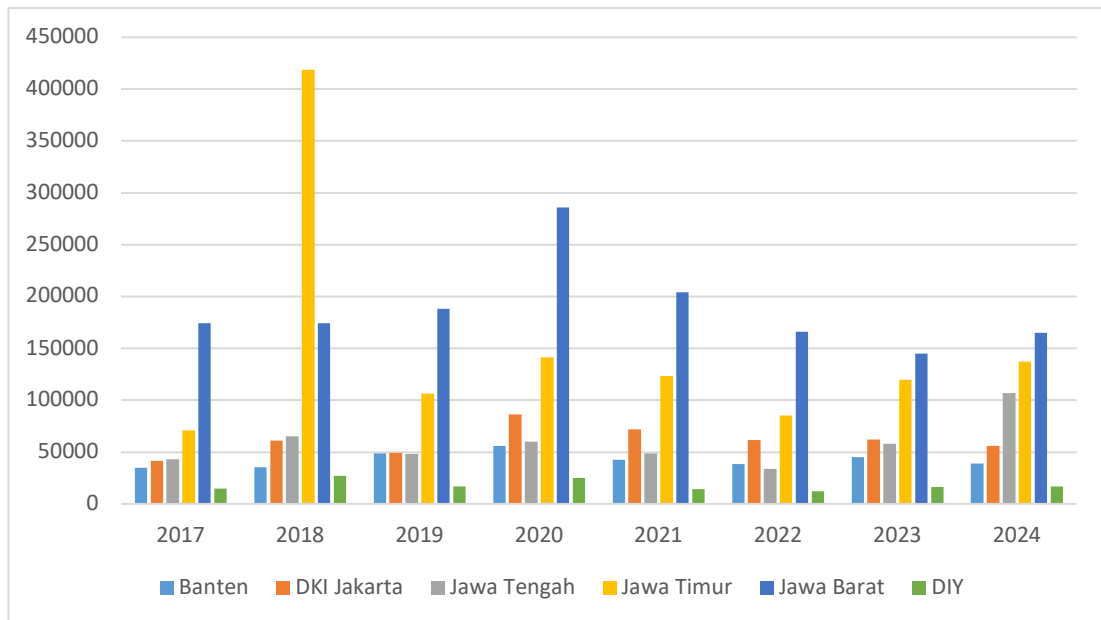
Gambar 1. Pengangguran Terdidik Provinsi Di Indonesia Tahun 2017-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tertinggi disumbang oleh Pulau Jawa. Pulau Jawa menyumbang lebih dari setengah jumlah total pengangguran terdidik nasional, terutama dari provinsi seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Tingginya pengangguran terdidik di Pulau Jawa mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan universitas yang sangat tinggi dan ketersediaan lapangan kerja yang stagnan atau tidak sesuai bidang. Di luar Pulau Jawa, meskipun perguruan tinggi tidak sebanyak di Jawa, namun

tingkat serapan kerja relatif lebih stabil karena sektor-sektor seperti pertambangan dan pemerintahan lebih dominan.

Pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi utama (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur) dengan jumlah penduduk sekitar 57% dari total penduduk Indonesia dan menjadi episentrum pendidikan tinggi nasional dengan ratusan universitas negeri dan swasta telah mencetak jutaan lulusan setiap tahunnya (Nurahmi et al., 2024). Ironisnya, tingginya tingkat kelulusan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan pasar kerja formal dalam menyerap tenaga kerja baru, terutama yang memiliki latar belakang akademik universitas (Anjarwati & Juliprijanto, 2019). Hal ini telah menciptakan fenomena sosial yang kompleks yaitu meningkatnya angka pengangguran terdidik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa wilayah ini juga menyumbang angka pengangguran terdidik tertinggi secara nasional. Berikut data jumlah pengangguran tingkat universitas di Provinsi Pulau Jawa.



Gambar 2. Pengangguran Terdidik Tahun 2017-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2024, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan universitas di provinsi-provinsi Pulau Jawa seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten relatif tinggi dan mengalami perubahan naik turun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah orang yang mencari pekerjaan, tetapi tidak diimbangi dengan adanya cukup lapangan kerja. Pengangguran terdidik ini mencerminkan penurunan produktivitas sumber daya manusia di suatu negara (Nurahmi et al., 2024).

Fenomena ini menjadi paradoks pembangunan, karena semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, namun justru dihadapkan pada realitas pasar kerja yang

tidak mampu menyerap mereka secara proporsional (Suryadarma et al., 2020). Peningkatan kuantitas pendidikan tidak serta merta menjamin peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi apabila tidak diiringi dengan kesiapan struktural dan kelembagaan yang memadai dari pasar tenaga kerja (Setyoningrum Fathorrazi & Wilantari, 2024). Kondisi ini menimbulkan ketimpangan struktural dalam dunia kerja yang dikenal sebagai *overeducation* atau *educational mismatch*, di mana kualifikasi pendidikan melebihi kebutuhan aktual pasar (Guritno & Muljaningsih, 2024). Kasus ini mengindikasikan adanya persoalan struktural yang tidak cukup dijelaskan hanya dengan faktor jumlah lulusan semata, tetapi juga terkait dinamika makroekonomi, kualitas pembangunan manusia, hingga kebijakan ketenagakerjaan regional.

Secara teoritis, pendidikan tinggi diyakini sebagai salah satu bentuk investasi manusia (human capital investment) yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Becker, 1994). Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan justru banyak yang tersisih dari pasar kerja formal. Tidak semua lulusan universitas memiliki keterampilan, pengalaman kerja, maupun akses terhadap jaringan industri yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan adanya *mismatch* antara output pendidikan tinggi dengan struktur dan kebutuhan riil industri serta sektor pekerjaan formal (Prasetia & Aisyah, 2024).

Mismatch ini disebabkan akibat ketidakseimbangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, ketidakseimbangan distribusi kesempatan kerja, serta dinamika pasar tenaga kerja yang belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal (Yusuf & Pratama, 2022). Hal ini diperparah oleh belum optimalnya sistem pendidikan tinggi dalam melakukan adaptasi terhadap dinamika industri, serta minimnya peran serta dunia usaha dalam mendesain kurikulum dan menyelenggarakan program magang (Prasetia & Aisyah, 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia, daya serap ekonomi, dan insentif tenaga kerja memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pengangguran terdidik (Hanushek & Zhang, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang mempertimbangkan indikator makroekonomi dan sosial secara simultan untuk memahami kompleksitas fenomena ini.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pengangguran terdidik tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan individual atau sektoral semata, melainkan perlu dikaji melalui indikator-indikator makroekonomi dan sosial secara simultan (Alatas & Cameron, (2021); (Utari & Nugroho, 2023). Salah satu indikator yang krusial adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Di Pulau Jawa, tingkat IPM menunjukkan trend meningkat. Meskipun IPM tinggi biasanya diasosiasikan dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik, peningkatan IPM tanpa dukungan penciptaan lapangan kerja justru dapat memunculkan frustrasi di kalangan lulusan (Hanushek & Zhang, 2020).

Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi indikator penting untuk mengukur kapasitas ekonomi suatu wilayah. Di banyak provinsi di Pulau Jawa, pertumbuhan PDRB tidak selalu sejalan dengan peningkatan serapan tenaga kerja karena pertumbuhan tersebut cenderung terkonsentrasi di sektor-sektor padat modal dan berorientasi ekspor (Zhuang & Wang, 2022). Hal ini menciptakan ketimpangan struktural dan mempersempit peluang kerja bagi lulusan universitas yang tidak memiliki keterampilan teknis spesifik.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi di Pulau Jawa juga menjadi indikator tekanan besar terhadap pasar tenaga kerja formal. TPAK yang meningkat tanpa diiringi oleh perluasan kesempatan kerja menyebabkan persaingan yang semakin ketat dan meningkatkan potensi pengangguran terdidik (ILO, 2022). Di sisi lain, kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) juga memainkan peran ganda. Di satu sisi, peningkatan UMR dapat mendorong daya beli dan kesejahteraan pekerja, namun di sisi lain dapat menekan kemampuan usaha kecil dan menengah dalam merekrut tenaga kerja baru, khususnya *fresh graduate* yang dianggap belum memiliki pengalaman kerja yang memadai (Wicaksono & Ferdiansyah, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran terdidik tingkat universitas di provinsi-provinsi Pulau Jawa merupakan persoalan multidimensi dan perlu penanganan khusus untuk menekan angka pengangguran terutama pengangguran terdidik tingkat perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh beberapa variabel makroekonomi dan sosial yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap tingkat pengangguran terdidik tingkat universitas di provinsi-provinsi Pulau Jawa dalam kurun waktu 2017–2024. Dengan menggunakan metode regresi data panel, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri, serta mendukung pembangunan ekonomi regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran secara umum, riset tentang pengangguran terdidik tingkat universitas dalam konteks spasial-provinsi dan temporal panjang (longitudinal) di Pulau Jawa masih terbatas. Sebagian besar kajian yang ada hanya berfokus pada level nasional atau lintas individu (cross-section), sehingga belum memberikan gambaran mendalam tentang dinamika ketenagakerjaan terdidik antar-provinsi di wilayah dengan kepadatan ekonomi tertinggi di Indonesia. Untuk itu penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pembaruan penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan.

TINJAUAN LITERATUR

1. Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik merupakan kondisi di mana seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi belum memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya (Rosalinda & Muhani, 2023). Teori *Human Capital* yang dikembangkan oleh Gary Becker (1994), berpandangan bahwa manusia, sebagaimana halnya mesin atau peralatan produksi, merupakan aset yang bisa ditingkatkan produktivitasnya melalui investasi seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, individu yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih tinggi diasumsikan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi (Becker, 1994).

Menurut teori ini, pendidikan adalah bentuk investasi dalam diri seseorang yang seharusnya meningkatkan produktivitas dan peluang mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks pasar tenaga kerja, individu dengan tingkat pendidikan tinggi seharusnya memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa lulusan universitas masih menjadi salah satu kelompok dengan tingkat pengangguran cukup tinggi, terutama di wilayah perkotaan dan pusat pendidikan seperti Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan adanya deviasi dari teori human capital, yang disebabkan oleh kondisi struktural, institusional, serta keterbatasan daya serap pasar kerja.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) mencerminkan kualitas manusia dalam tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan daya beli (Rozaini et al., 2023). HDI digunakan untuk mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara maju, berkembang, atau tertinggal serta untuk menilai bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi kualitas hidup masyarakat (Kusumaningrum & Nurhayati, 2023). Komposisi IPM didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu kesehatan dan harapan hidup, pendidikan, serta standar hidup (daya beli) atau tingkat pendapatan berdasarkan Badan Pusat Statistik.

Konsep *Capability Approach* oleh Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna (Sen, 1999). Teori *capability* menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang baik akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses pekerjaan layak. Menurut *capability approach*, peningkatan IPM bukan hanya indikator pembangunan, tetapi peningkatan kapasitas nyata manusia untuk hidup secara bermartabat. Maka, peningkatan IPM semestinya menurunkan tingkat pengangguran, termasuk dari kalangan terdidik. Berbagai studi seperti (Silvia & Susilowati, 2023) dan (Riya & Hedayanti, 2024) menemukan bahwa

peningkatan IPM belum tentu menurunkan pengangguran terdidik secara otomatis, terutama jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan relevansi pendidikan terhadap pasar tenaga kerja.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB dengan harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tahunan tertentu, sehingga bisa digunakan untuk mengamati perubahan struktur ekonomi. Sementara itu, PDRB dengan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa pada tingkat harga tertentu sebagai acuan, yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, di mana pengaruh perubahan harga tidak termasuk (Kusumaningrum & Nurhayati, 2023).

Teori Okun yang dikembangkan oleh Arthur Melvin Okun menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi, yang dikenal sebagai Hukum Okun (Okun, 1962). Menurut Hukum Okun, jumlah output yang dihasilkan oleh ekonomi bergantung pada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Semakin banyak tenaga kerja yang terlibat dalam produksi, maka semakin tinggi pula output yang dihasilkan (Permatasari et al., 2024). Namun demikian, jika pertumbuhan ekonomi tidak bersifat inklusif dan hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu (misalnya pertambangan atau properti), maka penyerapan terhadap tenaga kerja berpendidikan tinggi tetap terbatas. Penelitian oleh (Setyoningrum & Wilantari, 2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Pulau Jawa, membuktikan relevansi teori Okun dalam konteks ekonomi daerah. (Silvia & Susilowati, 2023) juga menemukan bahwa PDRB menjadi determinan utama penyerapan tenaga kerja di provinsi-provinsi besar.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai ukuran ketenagakerjaan yang menjelaskan kondisi penduduk yang secara ekonomi aktif dalam kegiatan sehari-harinya, berdasarkan jangka waktu periode survei (Putri et al., 2024). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menggambarkan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif mencari atau memiliki pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun, yang memiliki potensi untuk menghasilkan barang dan jasa (BPS, 2021).

Berdasarkan *labor supply theory*, semakin tinggi TPAK, maka semakin besar jumlah individu yang memasuki pasar kerja, baik dalam pekerjaan formal maupun informal (Hanushek & Zhang, 2020). Namun, peningkatan TPAK tidak selalu disertai dengan peningkatan kesempatan kerja (*labor demand*). Ketika

jumlah pencari kerja tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan kerja, maka akan terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja (oversupply), termasuk dari kalangan lulusan universitas. Hal ini menyebabkan pengangguran struktural, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Aulia & Boedirochminarni (2025) menemukan bahwa TPAK berpengaruh positif terhadap pengangguran terdidik di Pulau Jawa, artinya semakin besar angkatan kerja, semakin besar pula tekanan terhadap pasar kerja dan risiko pengangguran.

5. Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional adalah kebijakan untuk memastikan batas minimum pendapatan pekerja. Upah Minimum Regional (UMR) adalah tingkat upah paling rendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu wilayah tertentu untuk menjamin kelayakan hidup. UMR pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak pekerja agar memperoleh penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan hidup minimum (Rosalinda & Muhani, 2023).

Menurut *wage rigidity theory* menjelaskan bahwa upah nominal tidak mudah menyesuaikan diri secara fleksibel terhadap perubahan kondisi pasar tenaga kerja. Dalam teori ini, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau kebijakan institusional seringkali menciptakan kekakuan di pasar tenaga kerja, sehingga mencegah mekanisme pasar untuk bekerja secara optimal (Alatas & Cameron, 2021). Perusahaan cenderung menunda perekrutan jika UMR dianggap terlalu tinggi dibandingkan nilai kerja lulusan baru. Dalam konteks pengangguran terdidik, *wage rigidity* menjelaskan mengapa lulusan universitas sulit terserap di pasar kerja ketika upah minimum terlalu tinggi dibandingkan nilai produktivitas awal mereka. Penelitian (Guritno & Muljaningsih, 2024) menunjukkan bahwa peningkatan UMR di Jawa Barat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, terutama dari kalangan lulusan universitas yang baru menyelesaikan pendidikan. Prasetya & Aisyah (2024) juga menyoroti bahwa perusahaan-perusahaan cenderung lebih selektif merekrut lulusan baru ketika UMR meningkat, karena risiko mismatch dengan produktivitas awal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kuantitatif, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu penggabungan antara data deret waktu dan data lintas sektoral. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 6 provinsi di Pulau Jawa, dengan rentang waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data pengangguran terdidik

tingkat universitas, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Dalam penelitian ini, model ekonometrika digunakan untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut berupa persamaan fungsi $Y = f$ (Indeks Pembangunan Manusia, produk domestik regional bruto, upah minimum provinsi, tingkat partisipasi angkatan kerja). Model pada penelitian ini setelah menggunakan logaritma sebagai berikut :

$$\text{LogPT}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{IPM}_{it} + \beta_2 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_3 \text{TPAK}_{it} + \beta_4 \text{LogUMR}_{it} + e_{it}$$

LogPT = Logaritma Pengangguran Terdidik (%)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (%)

LogPDRB_{it} = Logaritma Produk Domestik Regional Bruto (%)

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

LogUMR = Logaritma Upah Minimum Regional (%)

β_0 = Konstanta

β_1, \dots, β_4 = Koefisien regresi variabel independen

i = Data *cross section* Provinsi di Pulau Jawa

t = *Time series* tahun 2017-2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

1. Pengangguran Terdidik Provinsi di Pulau Jawa

Pengangguran terdidik merujuk pada lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) yang belum bekerja. Meskipun Pulau Jawa memiliki infrastruktur pendidikan dan ekonomi yang maju, tingkat pengangguran terdidik masih tinggi di beberapa provinsi karena mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2024 tingkat pengangguran di Provinsi Banten sebanyak 38.991 jiwa, provinsi DKI Jakarta sebanyak 56.146 jiwa, provinsi Jawa Tengah sebanyak 106.632 jiwa, provinsi Jawa Timur sebanyak 137.406 jiwa, provinsi Jawa Barat sebanyak 165.144 jiwa, dan provinsi DIY sebanyak 16.852. Provinsi dengan TPT terdidik tertinggi adalah DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, diduga akibat urbanisasi tinggi, ekspektasi kerja yang selektif, dan kelebihan pasokan lulusan. Sementara itu, Jawa Tengah dan Banten mencatat angka relatif lebih rendah. Secara umum, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan konsentrasi pengangguran terdidik terbesar secara nasional.

2. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat dalam tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di Pulau Jawa, nilai IPM rata-rata tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Pada tahun 2023, lima dari enam provinsi di Pulau Jawa memiliki IPM di atas rata-rata nasional (HDI Indonesia 2023 = 74,39). Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2024 IPM di Provinsi Banten sebesar 76,35 persen, provinsi DKI Jakarta sebesar 84,15 persen, provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87 persen, provinsi Jawa Timur sebesar 75,35 persen, provinsi Jawa Barat sebesar 74,92 persen, dan provinsi DIY sebesar 81,62 persen. Tingginya IPM di Pulau Jawa menunjukkan bahwa akses pendidikan dan kesehatan cukup baik.

3. Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa

PDRB merupakan ukuran output ekonomi regional yang dihitung berdasarkan nilai tambah dari semua sektor produksi. Di Pulau Jawa, PDRB menyumbang lebih dari 59% terhadap total Produk Domestik Bruto Indonesia (BPS, 2024), menjadikan wilayah ini sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional. Berikut data PDRB atas dasar harga konstan (dalam triliun rupiah) Jawa Barat sebesar Rp 1.752 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp 2.151 triliun, Jawa Timur sebesar Rp 1.935 triliun, Jawa Tengah sebesar Rp 1.177 triliun, Banten sebesar Rp 531 triliun, DI Yogyakarta sebesar Rp 124 triliun (*Sumber: BPS, 2024*). Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan karena perubahan nilai PDRB mencerminkan perubahan volume atau kuantitas produksi, bukan akibat kenaikan harga.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa

TPAK menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15–64 tahun) yang aktif secara ekonomi, yaitu bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPAK menjadi salah satu indikator penting dalam analisis ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS 2024, TPAK di provinsi-provinsi Pulau Jawa tergolong tinggi. Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat TPAK sebesar 76,17%, Jawa Barat sebesar 65,10%, Jawa Tengah sebesar 73,74%, Jawa Timur sebesar 67,71%, Banten sebesar 74,78%, DI Yogyakarta sebesar 73,45% (*Sumber: Sakernas BPS, Februari 2024*).

5. Upah Minimum Regional di Pulau Jawa

UMR adalah standar minimum upah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi setiap tahun untuk menjamin pendapatan layak bagi pekerja. Di Pulau Jawa, UMR relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Berdasarkan data dari BPS, Provinsi Jakarta memiliki tingkat UMR sebesar Rp 5.067.381, Banten sebesar Rp 2.727.812, Jawa Barat sebesar Rp 2.057.495, Jawa Tengah sebesar Rp 2.060.348, DI Yogyakarta sebesar Rp 2.125.898, Jawa Timur sebesar Rp 2.165.244 (*Sumber: Keputusan Gubernur dan BPS, 2024*).

Hasil Penelitian

1. Pemilihan Model

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi Eviews 10. Adapun cara yang dilakukan untuk memilih model yang tepat untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*.

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi panel dengan menggunakan metode *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan metode data panel tanpa variabel dummy atau metode *Common Effect*. Berikut ini hasil estimasi dengan menggunakan uji chow.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	Prob
Cross-section F	5.500900	0.0007
Cross-section Chi-square	26.137568	0.0001

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji chow diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section* sebesar 0.0001 atau <0.05 , maka H_0 ditolak. Untuk itu model yang dipilih dalam uji ini yaitu model *Fixed Effect* (FEM).

b. Uji Hausman

Pada regersi ini menggunakan model *Fixed Effect* dan model *Random Effect* perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan uji hausman. Berikut ini uji hausman dalam penelitian

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-square statistic	Prob
Cross-section random	3.151351	0.5328

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji hausman di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar 0.5328. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dipilih dalam pengujian ini yaitu model *Random Effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect*. Berikut hasil dari uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel 3. Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	11.4344	2.657331	14.09181
	0.0007	0.1031	0.0002

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji *Lagrange Multiplier* diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section Breusch-Pagan sebesar 0.0007, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dipilih dalam pengujian ini yaitu model *Random Effect*.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan memiliki korelasi antar variabel bebas (independent variable). Berikut uji multikolinieritas dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	IPM	LOPDRB	TPAK	LOGUMR
IPM	1.000000	0.164793	0.019613	0.500914
LOGPDRB	0.164793	1.000000	-0.650109	0.471860
TPAK	0.019613	-0.650109	1.000000	-0.419247
LOGUMR	0.200914	0.471860	-0.419247	1.000000

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai dari masing-masing variabel tidak ada yang lebih dari 0.8. Hal ini berarti model *regresi* pada penelitian terbebas dari masalah multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi adalah dengan melakukan perbandingan nilai Durbin-Watson (DL dan DU). Berikut hasil uji autokorelasi pada penelitian ini.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
1	2.284101

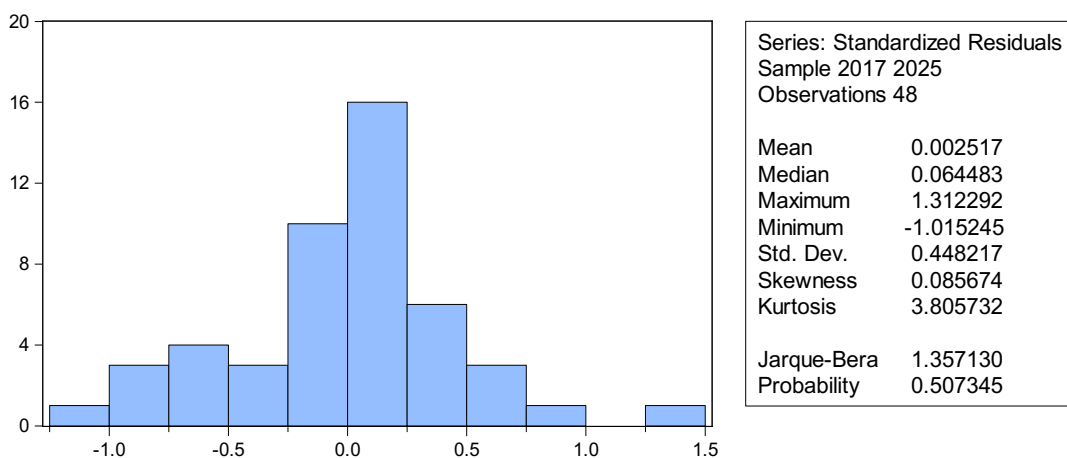
Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai durbin Watson sebesar 2.284101. untuk melihat ada tidaknya masalah autokorelasi dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson dengan tabel Durbin Watson. Dalam penelitian ini $n=48$ serta $k=5$ $dl=1.367$, $du=1.17725$, $4-du = 2,279$ untuk itu model berada dalam daerah ragu-ragu.

Dalam konteks model regresi data panel, khususnya dengan pendekatan Random Effect Model (REM), pengujian autokorelasi sering tidak menjadi prioritas utama karena karakteristik panel data yang menggabungkan dimensi waktu dan entitas sudah mengakomodasi banyak variasi residual secara alami. Menurut Gujarati & Porter (2015), pengujian autokorelasi lebih relevan pada data time series murni dibandingkan dengan data panel.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera test (J-B test)* Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini.



Gambar 3. Uji Normalitas-Uji Jarque-Berra

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0.507345 > \alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan uji *glejser*. Berikut ini hasil uji Glejser pada model.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas-Uji Glejser

Variabel	Prob
IPM	0.5664
LOGPDRB	0.1566
TPAK	0.2689
LOGUMR	0.1438

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel di atas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian terbebas dari masalah heterokedastisitas.

3. Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji pemilihan model pada regresi data panel menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan yaitu model *Random Effect*. Berikut ini hasil estimasi dalam regresi menggunakan model *Random Effect*.

Tabel 7. Hasil Uji Data Panel

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
C	8.021536	1.940024	0.0590
IPM	0.061047	2.646285	0.0113
LOGPDRB	0.550228	6.533858	0.0000
TPAK	-0.083936	-3.588708	0.0008
LOGUMR	-0.236592	-0.719097	0.4760
R-square	0.768374		
Adjusted R-square	0.746827		
Prob. F-statistik	0.000000		

Sumber: Data diolah, 2025

Bentuk persamaan regresi dengan mengacu pada model 7 dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{LOGPT} = 0.061047 \text{ IPM} + 0.550228 \text{ LOGPDRB} - 0.083036 \text{ TPAK} - 0.236592 \text{ LOGUMR} + 8.021536$$

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan model *Random Effect* menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki nilai koefisien sebesar 0.061047 dan probabilitas sebesar 0.0113. Hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik tingkat universitas di Pulau Jawa. Nilai koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0.550228 dan probabilitas sebesar 0.0000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik tingkat universitas di Pulau Jawa.

Nilai koefisien variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar -0.083936 dan probabilitas sebesar 0.0008. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik tingkat universitas di Pulau Jawa. Variabel UMR memiliki nilai koefisien sebesar -0.236592 dengan probabilitas sebesar 0.4760, dapat disimpulkan bahwa variabel UMR tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran terdidik tingkat universitas di Pulau Jawa.

Nilai F-statistik sebesar 35.66095 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan F-tabel 2.432. Nilai probabilitas juga menunjukkan angka sebesar 0.000000 dimana nilai ini lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa variabel independen (IPM, PDRB, TPAK, Dan UMR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai Adjusted R-square sebesar 0.746827 yang bermakna bahwa variabel independen (IPM, PDRB, TPAK, dan UMR) memiliki pengaruh sebesar 74 persen terhadap tingkat pengangguran terdidik tingkat universitas setiap provinsi di pulau jawa, sementara sisanya yaitu sebesar 26 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada model.

Pembahasan

a. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Terdidik

Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai koefisien sebesar 0.061047 dan probabilitas sebesar 0.0113. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan IPM 1 satuan maka akan meningkatkan pengangguran provinsi di Pulau Jawa 0.6 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan IPM justru diikuti oleh kenaikan pengangguran terdidik tingkat universitas. Berdasarkan pendekatan *Capability*, hal ini dapat dimaknai sebagai kesenjangan antara meningkatnya kemampuan dasar manusia (*capabilities*) dan terbatasnya peluang nyata (*opportunities*) yang tersedia di pasar kerja. Dengan kata lain, meskipun seseorang memiliki pendidikan tinggi (IPM tinggi), jika kondisi struktural, ekonomi, dan kelembagaan tidak mendukung, maka mereka tidak dapat mengaktualisasikan kemampuan tersebut dalam bentuk pekerjaan yang produktif dan bermakna.

Di provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta, IPM tergolong tinggi. Akses ke pendidikan tinggi semakin luas, tetapi penciptaan lapangan kerja formal yang sesuai dengan kualifikasi lulusan tidak tumbuh secepat pertumbuhan jumlah lulusan universitas. Hal ini menciptakan surplus tenaga kerja terdidik. *Capability Approach* juga menekankan pentingnya aspirasi dan pilihan hidup (Sen, 1999). Lulusan pendidikan tinggi cenderung memiliki ekspektasi terhadap jenis pekerjaan tertentu: formal, sesuai jurusan, gaji tinggi, dan berstatus sosial tinggi. Ketika pasar kerja tidak menyediakan opsi seperti itu, mereka memilih untuk tidak bekerja atau menunggu pekerjaan ideal, meskipun secara kapabilitas mereka mampu bekerja. Oleh karena itu, pengangguran di kalangan terdidik tidak selalu mencerminkan kegagalan individu, tetapi kegagalan struktur sosial dan ekonomi dalam menyediakan pilihan hidup yang bermakna dan sesuai dengan nilai yang dimiliki masyarakat.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara kuantitatif (misalnya bertambahnya angka lama sekolah) belum tentu diikuti dengan pendalaman kualitas pendidikan dan kesiapan kerja lulusan. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan vokasi, soft skills, dan fleksibilitas kerja yang dibutuhkan oleh pasar global saat ini. Dengan demikian, peningkatan IPM saja tidak cukup, jika tidak disertai reformasi kurikulum, pelatihan kerja, dan dukungan terhadap transisi pendidikan ketenagakerjaan. Berdasarkan penelitian Setyoningrum & Wilantari, (2024) bahwa provinsi-provinsi dengan IPM tinggi di Pulau Jawa justru memiliki tingkat pengangguran terdidik yang tinggi pula. Riya & Heldayanti (2024)

menyatakan bahwa peningkatan IPM tanpa kebijakan penyerapan tenaga kerja justru menciptakan ekspektasi sosial yang tidak realistis dan meningkatkan friksi pasar kerja.

Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tanpa sinergi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas justru dapat menciptakan frustrasi struktural. Oleh karena itu, saran untuk mengembangkan sektor padat karya terdidik seperti industri digital dan riset menjadi penting. Pemerintah harus melihat IPM tidak hanya sebagai indikator keberhasilan pembangunan, tetapi sebagai panggilan untuk menyediakan pekerjaan bermakna yang sepadan dengan kapasitas manusia. Perlu penguatan kebijakan yang mengintegrasikan hasil pendidikan tinggi dengan dunia kerja melalui reformasi kurikulum, pelatihan, dan insentif sektor privat.

b. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pengangguran Terdidik

Variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai koefisien sebesar 0.550228 dan probabilitas sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PDRB 1 persen maka akan meningkatkan pengangguran provinsi di Pulau Jawa 0.5 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini menunjukkan bahwa Okun's Law tidak selalu berlaku secara kuat di negara berkembang atau pada jenis pengangguran terdidik, terutama ketika pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan pekerjaan berkualitas yang sejalan dengan peningkatan pendidikan. Ball & Loungani, (2017) mencatat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran semakin lemah jika tidak dibarengi dengan struktur pasar tenaga kerja yang fleksibel dan inklusif.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur merupakan wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di Indonesia. Namun, pertumbuhan PDRB tersebut lebih banyak disumbang oleh sektor yang tidak padat karya terdidik, seperti sektor perdagangan besar, keuangan, real estate, dan industri skala besar. Sektor-sektor ini tidak banyak menyerap tenaga kerja lulusan universitas secara proporsional, sehingga menciptakan ketimpangan struktural antara output ekonomi dan serapan tenaga kerja terdidik. Penelitian Setyoningrum & Wilantari (2024) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa belum sepenuhnya inklusif bagi lulusan pendidikan tinggi karena cenderung tersentralisasi pada sektor kapital intensif. Sebaliknya, sektor-sektor yang lebih padat karya terdidik seperti pendidikan, penelitian, teknologi, dan ekonomi kreatif tidak berkembang secepat sektor lain, sehingga peningkatan output ekonomi tidak serta-merta menurunkan tingkat pengangguran lulusan universitas.

Berdasarkan penelitian Setyoningrum & Wilantari (2024) bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di provinsi-provinsi besar Pulau Jawa justru diiringi dengan pengangguran terdidik yang tinggi karena ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan permintaan kerja. Penelitian Silvia & Susilowati (2023) menyatakan bahwa PDRB bukan penentu utama penyerapan lulusan universitas, melainkan sektor ekonomi dominan dan orientasi industri. Maka dari itu,

pengembangan sektor berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, serta ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menyesuaikan arah pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan tenaga kerja terdidik. Pemerintah daerah perlu memberi insentif terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi melalui inkubasi, pembiayaan riset, dan fasilitasi industri kreatif.

c. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik

Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki nilai koefisien sebesar -0.083936 dan probabilitas sebesar 0.0008. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan TPAK 1 persen maka akan tingkat pengangguran provinsi di pulau jawa turun 0.08 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Koefisien negatif TPAK terhadap pengangguran terdidik menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja dari kalangan terdidik berasosiasi dengan penurunan jumlah pengangguran terbuka tingkat universitas. Hal ini menandakan bahwa lulusan pendidikan tinggi yang aktif dalam pasar kerja baik dalam mencari kerja, mengikuti pelatihan, atau mengambil kesempatan informal memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

Peningkatan TPAK mencerminkan semakin besarnya jumlah individu usia produktif yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk dari kalangan lulusan perguruan tinggi. Dalam konteks ini, tingginya TPAK menunjukkan bahwa lulusan universitas tidak hanya pasif menunggu pekerjaan formal, tetapi juga mulai bersikap fleksibel terhadap sektor dan jenis pekerjaan yang tersedia, termasuk sektor informal, wirausaha, atau pekerjaan berbasis digital. Menurut Borjas (2020) dalam *Labor Economics*, partisipasi kerja adalah prasyarat penting bagi penyerapannya tanpa partisipasi aktif, peluang terserap di pasar kerja sangat kecil, meskipun pekerjaan tersedia.

Selain itu, pemerintah daerah di Pulau Jawa telah banyak mengembangkan program pelatihan vokasional, inkubasi kewirausahaan, *job fair*, dan program magang kerja, yang berfungsi sebagai jembatan transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Program-program ini sangat efektif ketika tenaga kerja terdidik memiliki inisiatif tinggi untuk terlibat secara aktif (TPAK tinggi). Menurut Aulia & Boedirochminarni (2025), provinsi dengan TPAK tinggi seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah cenderung memiliki tingkat pengangguran terdidik yang lebih rendah, karena tenaga kerja lebih cepat terserap melalui berbagai jalur alternatif pekerjaan. Riya & Hedayanti (2024) menyatakan bahwa TPAK tinggi berkorelasi dengan pasar kerja yang lebih aktif dan tingkat pengangguran terdidik yang lebih rendah di Pulau Jawa. Hal ini didukung oleh penelitian Aulia & Boedirochminarni, N, (2025) yang menekankan bahwa peningkatan TPAK mencerminkan keterlibatan aktif lulusan perguruan tinggi dalam dinamika ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil ini, penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pelibatan aktif lulusan baru dalam dunia kerja seperti program magang, pelatihan kewirausahaan, dan *job fair* digital. Peningkatan TPAK bukan sekadar kuantitas,

tetapi harus disertai dengan kualitas partisipasi. Hal ini akan mempercepat proses transisi dari pendidikan ke pekerjaan bagi lulusan universitas.

d. Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terdidik

Variabel Upah Minimum Regional memiliki nilai koefisien sebesar -0.236592 dengan probabilitas sebesar 0.4760. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan UMR 1 persen maka akan tingkat pengangguran provinsi di pulau jawa turun 0.4 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. dapat disimpulkan bahwa variabel UMR tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran terdidik tingkat universitas di Pulau Jawa. Koefisien regresi yang tidak signifikan menunjukkan bahwa besaran UMR tidak menjadi faktor penentu utama dalam naik-turunnya pengangguran terdidik. Dalam konteks ini, meskipun terdapat kenaikan UMR di beberapa provinsi di Pulau Jawa dari tahun ke tahun, hal tersebut tidak berkorelasi langsung dengan peluang atau hambatan kerja bagi lulusan universitas.

Lulusan universitas umumnya mencari pekerjaan di sektor formal profesional dengan skema gaji berdasarkan struktur internal perusahaan, posisi, dan kualifikasi, bukan berdasarkan UMR. Banyak sektor yang menjadi sasaran lulusan perguruan tinggi seperti keuangan, pendidikan tinggi, teknologi informasi, pemerintahan, atau penelitian tidak menggunakan UMR sebagai acuan penggajian. Sebaliknya, UMR lebih relevan bagi pekerja dengan pendidikan menengah ke bawah, atau mereka yang bekerja di sektor manufaktur, perhotelan, perdagangan, atau jasa dasar. Hal ini selaras dengan temuan Guritno & Muljaningsih (2024) bahwa UMR hanya berdampak signifikan terhadap pengangguran lulusan SMA/SMK, tetapi tidak signifikan bagi lulusan universitas.

Selain itu, lulusan universitas memiliki ekspektasi kerja dan aspirasi sosial yang lebih tinggi. Mereka cenderung mempertimbangkan faktor lain seperti prospek karier, reputasi institusi, kesesuaian bidang studi, serta fleksibilitas kerja, daripada sekadar nominal upah minimum. Dengan demikian, meskipun UMR naik, hal tersebut tidak serta-merta menarik lulusan universitas untuk mengambil pekerjaan, khususnya jika pekerjaan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kualifikasi atau status sosial mereka. Penelitian Hanushek & Zhang (2020) yang menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum cenderung tidak berdampak pada lulusan pendidikan tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Silvia & Susilowati (2023) yang menyatakan bahwa UMR lebih berdampak pada tenaga kerja berpendidikan rendah.

Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan untuk lulusan perguruan tinggi sebaiknya difokuskan pada penciptaan ruang kerja yang sesuai dengan kualifikasi akademik. UMR tetap penting untuk sektor non-terdidik, namun tidak cukup untuk menjawab tantangan pengangguran terdidik. Fokus kebijakan harus pada produktivitas tenaga kerja terdidik dan penataan sistem pengupahan berbasis kompetensi dan jenjang karier.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel terhadap enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2017–2024, serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik tingkat universitas. Peningkatan IPM, khususnya dalam aspek pendidikan, tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang relevan dan cukup bagi lulusan perguruan tinggi. Hal ini menciptakan ketimpangan antara peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dengan peluang aktual di pasar kerja, sebagaimana dijelaskan dalam *Capability Approach* (Sen).
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa belum bersifat inklusif terhadap tenaga kerja terdidik. Sektor-sektor ekonomi yang mendorong PDRB cenderung tidak menyerap lulusan universitas secara optimal, sehingga pengangguran tetap tinggi meskipun ekonomi daerah bertumbuh, bertentangan dengan Teori Okun.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Semakin tinggi TPAK, semakin rendah pengangguran terdidik, karena partisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja mencerminkan kesiapan dan fleksibilitas lulusan dalam memasuki dunia kerja. Temuan ini sejalan dengan *Labor Supply Theory*.
4. Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik. Lulusan universitas cenderung bekerja di sektor dengan struktur upah yang tidak mengacu pada UMR, sehingga kebijakan ini tidak memengaruhi keputusan bekerja atau tidak bagi kelompok terdidik.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa peningkatan IPM, khususnya pendidikan tinggi, disertai dengan ekspansi lapangan kerja yang sepadan, baik dari sisi jumlah maupun jenis pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor padat karya terdidik seperti industri digital, riset, teknologi, dan ekonomi kreatif.
2. Sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha perlu diperkuat agar kurikulum pendidikan tinggi relevan dengan kebutuhan industri, serta lulusan memiliki keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

3. TPAK harus terus ditingkatkan melalui kebijakan pelibatan aktif lulusan baru dalam aktivitas produktif, baik melalui *job fair*, pelatihan, program pemagangan, maupun akses informasi kerja berbasis digital.
4. Kebijakan pengupahan (UMR) tetap penting bagi kelompok rentan, namun bagi lulusan perguruan tinggi, kebijakan yang lebih relevan adalah peningkatan produktivitas dan penyediaan ruang kerja yang sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi mereka.
5. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain seperti mismatch pendidikan, *digital literacy*, atau sektor penyerapan kerja, serta analisis kuantitatif dan kualitatif lanjutan untuk menggambarkan fenomena pengangguran terdidik secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas & Cameron, L. (2021), V. (2021). minimum wages and labor market outcomes in Indonesia: Evidence from a reform. *World Bank Economic Review*, 35(1), 45–65.
- Anjarwati, L., & Juliprijanto, W. (2019). Determinan Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ekonomu Pembangunan (JEP)*, 178–187.
- Aulia & Boedirochminarni, N, R. (2025). Dinamika Pengangguran Terbuka di Provinsi Pulau Jawa. 3(2).
- Ball Leigh, D., & Loungani, L. (2017). Okun's Law: Fit at Fifty? *Journal of Money, Credit and Banking*, 49(7), 1413–1441.
- Bank, W. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Managing Risks, Seizing Opportunities*.
- Becker, G. S. (1994). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. *University of Chicago Press*.
- Borjas, G. J. (2020). Labor Economics (8th ed.). *McGraw-Hill Education*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Guritno & Muljaningsih, S, M. (2024). Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Kesempatan Kerja terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Barat. *JDESS*, 3(1).
- Hanushek Woessmann, L., & Zhang, L, E. A. (2020). General Education, Vocational Education, and Labor-Market Outcomes. *Journal of Human Resources* , 55(3), 734–774.
- ILO. (2022). *World Employment and Social Outlook – Trends*. Geneva: *International Labour Organization*. Jawa.
- Kusumaningrum, R. R., & Nurhayati, S. F. (2023). ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, DAN RATA-RATA PENGELUARAN PERKAPITA TERHADAP UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI

KARESIDENAN PEKALONGAN TAHUN 2017-2021. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(5), 859–867.

Muna, N., Nahdi, S., Amalika, H., Salsabila, N., & Ningsih, V. K. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Pulau Jawa. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–15.

Nurahmi, A., Jaya, H. K. T., Fatmawati, A., & Jati, D. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN TERDIDIK DI PULAU JAWA. *Prosiding Nasional 2024 Universitas*, 28–38.

Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. *American Statistical Association*.

Permatasari, D., Winanto, A. R., Abas, S., Pembangunan, E., Ponorogo, U. M., Timur, J., & Wage, M. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja , Upah Minimum Provinsi , Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 8(3), 1179–1188. <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.28267>

Prasetia & Aisyah, L., D. (2024). Determinants of Educated Unemployment in Java. *Innovative Journal of Social Science Research*, 4(2).

Prasetia & Aisyah, L., D. (2024). Determinants of Educated Unemployment in Java. *Innovative*, 4(2).

Putri, D. D., Wijaya, S. E., Sofiah, Aini, Q., & Ulum, B. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja , Dan Pertumbuhan. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)*, 1(2), 316–325. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i2.68>

Riya Ismail, M., & Heldayanti, N. D. (2024). Pengaruh Kualitas Pendidikan terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Jawa. *JEMeS*, 7(1).

Rosalinda, M. S. W. M., & Muhani, H. M. (2023). DETERMINAN PENGANGGURAN TERDIDIK DI INDONESIA Milda. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, VII, 309–320.

Rozaini, N., Sinaga, M. E. R., Ekonomi, F., Medan, U. N., Ekonomi, P., Provinsi, U. M., Ekonomi, P., Provinsi, U. M., & Manusia, I. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 7(2), 290–300.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Setyoningrum Fathorrazi, A., & Wilantari, R., E. (2024). Analisis Pengangguran Terdidik di Pulau Jawa Tahun 2016–2022. *Ekilibrium*, 8(2).

Silvia & Susilowati, H. R. (2023). Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(4).

Suryadarma Suryahadi, A., Sumarto, S., & Rogers, H. D. (2020). mproving student

learning in Indonesia: Challenges and opportunities. *Asian Development Review*, 37(1), 85–108.

Utari Karo Karo Harahap, M., & Nugroho, Y, N. (2023). Human development index and its paradox in labor absorption in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 50(1), 89–103.

Wicaksono & Ferdiansyah, R, A. (2021). Education-labor market mismatch in Indonesia: A provincial analysis. *Economic Journal of Emerging Markets*, 13(2), 115–125.

Yusuf & Pratama, A, M. (2022). The challenge of university graduates in Indonesian labor market: Overeducation and unemployment. *Indonesian Journal of Applied Economics*, 12(1), 1–13.

Zhuang Zhao, Y., & Wang, C, R. (2022). Inclusive growth and structural transformation in Asia. *Asian-Pacific Economic Literature*, 36(1), 23–39.